

**Perumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.5.06..0.00.01.0000- SEKRETARIAT DAERAH											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif dan akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan	Nilai LPPD (Nilai)		3,25	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	
		Meningkatnya kualitas Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Pembangunan yang sudah dilaksana (Persentase)	-	100	100	100	100	100	100	
		Terkelolanya Kawasan Perbatasan	Persentase Kawasan Perbatasan yang dikelola (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD
(BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH							
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Evektivitas Kerja sama Daerah (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Terlaksananya Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	ARG
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1..01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah	
				Terlaksananya Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.102 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.102 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	
				Terfasilitasinya Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0002 - Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.1.0003 - Evaluasi Kerja Sama	
		Terkelolanya Kawasan Perbatasan			Persentase Kawasan Perbatasan Yang Dikelola (Persentase)		
			Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Perbatasan		Persentase Kawasan Perbatasan Yang Dikelola (Persentase)	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
				Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.1.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	

				Terselesaikannya kewilayah perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.1.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5.06.02.1.02.0003 - Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kawasan Perbatasan yang Dikelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kerjasama Pembangunan yang sudah dilaksanakan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai LPPD	Nilai	3,25	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	